

DAFTAR PUSTAKA

- Elmi, Bachrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: UI-Press
- Hendrawan, Suluh., Nur Anisah., dan Lina Nasihatun Nafidah. 2019. Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(2): 227-236.
- Jafar, Saidi. 2012. *Hukum keuangan negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jimly, Asshiddiqie. 2013. *Konstitusi Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly, Asshiddiqie. 2014. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Lan, Tim. 2004. *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi Kedua)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Robbins, Tephenn P. 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi* Terjemahan Jusuf Udaya, lic.,ec.. Jakarta: Arcan.
- Septiani, Selly., dan Endah Kusumawati. 2019. Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip *Good Governance* (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *10th INdustry Research Workshop and National Seminar*.
- Sugiyono. 2013. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrani, dr. dan dr. Syahrani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Teguh, 2014. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Nusa Media.
- Tim Peneliti FH UNDIP. 2015. *Persyaratan dan Implikasi Pengaturan Pembatasan Transaksi Tunai di Indonesia*. Buletin Hukum Kebanksentralan, 12.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2004. *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*. Jakarta.

Jati, Wasisto Raharjo. 2015. *Less Cash Society: Menakar Mode Konsumerisme Baru Kelas Menengah Indonesia*. Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI).

Yuwono, Sony dkk. 2007. *Memahami APBD Dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang: Bayumedia Publishing.

Yuval Noah Harari. 2020. *Money; Hikayat Uang dan Bangkitnya Kaum Rebahan*. Manado: Globalindo.

Yuval Noah Harari. 2014. *Sapiens: Sejarah Ringkas Umat Manusia Dari Zaman Batu Hingga Prakiraan Kepunahannya*. Jakarta: Kompas Gramedia Utama.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

Peraturan gubernur Sulawesi Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Transaksi Non Tunai.

LAMPIRAN I

KUESIONER TRANSAKSI NON TUNAI DAN GOOD GOVERNANCE

Assalamualaykum Warahmatullahi Wabarakathu.

Selamat Pagi/Siang/Sore.

Saya Jumiyanthi Latif, Mahasiswi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, yang sedang melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Transaksi Non Tunai terhadap Good Governance (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat)**”. Untuk itu mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk mengisi kuesioner dalam rangka pengumpulan data.

Dalam pengisian kuesioner ini, Bapak/Ibu/Saudara(i) diharapkan menjawab semua pertanyaan dengan baik dan sejujur-jujurnya. Kejujuran anda akan memberikan manfaat berarti bagi penelitian ini, dan pada akhirnya akan menjadi masukan bagi kita semua.

Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

❖ DATA RESPONDEN

1. Jenis Kelamin
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan

2. Umur
 - a. 18-24 tahun
 - b. 25-34 tahun
 - c. 35-44 tahun
 - d. 45-54 tahun
 - e. 55-64 tahun
 - f. > 64 tahun

3. Pengalaman Menjadi Bendahara
 - a. < 1 tahun
 - b. 1-3 tahun
 - c. 3-5 tahun
 - d. > 5 tahun

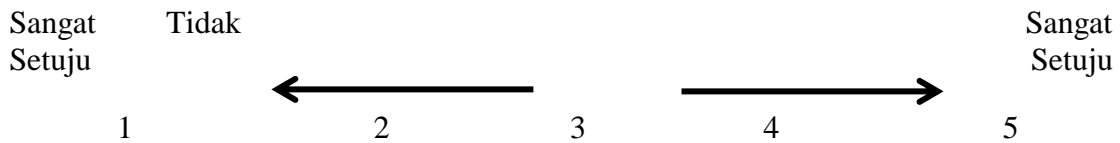
4. Frekuensi Melakukan Transaksi Non Tunai
 - a. 1 x seminggu
 - b. 2 x seminggu
 - c. 3 x seminggu
 - d. > 3x seminggu
 - e. Setiap Hari
 - f. >

**KISI-KISI INSTRUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGUKUR
TRANSAKSI NON TUNAI DAN *GOOD GOVERNANCE***

Variabel Penelitian	Indikator	No. Item Instrumen
Transaksi Non Tunai	1. Efisiensi	1, 2, 3
	2. Keamanan	4, 5, 6
	3. Manfaat	7, 8, 9
<i>Good Governance</i>	1. Transparansi	1, 2, 3
	2. Akuntabilitas	4, 5, 6
	3. Efisiensi dan Efektivitas	7, 8, 9

Transaksi Non Tunai

Lingkarilah yang sesuai dengan tindakanan dasar melakukan transaksi non tunai berikut ini:

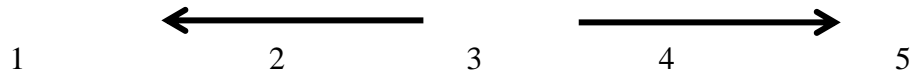


- | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|
| 1. | SPJ lebih cepat saya peroleh ketikan penerapan system transaksi non tunai telah dicanangkan. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Sistem pembayaran non tunai member kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Dengan penerapan system transaksi non tunai pemerintah daerah bisa bertransaksi secara <i>real time</i> . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Pembayaran non tunai mengurangi risiko keamanan saat melakukan setoran uang seperti perampokan. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Seluruh transaksi non tunai didukung oleh bukti yang sah. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Sistem transaksi non tunai meningkatkan ke disiplinan pengelola keuangan dalam melakukan pencatatan dengan sedikit kesalahan. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Pembayaran non tunai dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja karena hanya menggunakan teknologi dalam pembayarannya. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Sistem transaksi non tunai meningkatkan pengendalian internal terhadap pengelolaan kas. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. | Penerapan system transaksi non tunai terjamin aman serta terjaga kerahasiaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Good Governance

Lingkarilah yang sesuai dengan pemahaman anda tentang *Good Governance* berikut ini:

Sangat Setuju Tidak Sangat Setuju



- | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|
| 1. | Sistem pembayaran non tunai bersifat transparan karena setiap transaksi non tunai yang dilakukan terekam dan tercatat oleh system perbankan. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri secara <i>real time</i> dikarenakan seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Dengan sudah adanya penerapan transaksi non tunai ini secara tidak langsung setiap alur keluar masuk APBD sudah dapat diketahui oleh publik. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Penerapan system transaksi non tunai membuat penyerapan anggaran akan lebih terkontrol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah dapat menekan tingkat penyelewengan terutama korupsi. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Dengan adanya penerapan transaksi non tunai ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta pihak swasta kepada aparaturn pemerintahan yang dapat mempertanggungjawabkan semua hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemerintah daerah. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Sistem transaksi non tunai memudahkan dan mempercepat pelaksanaan setoran/tagihan dari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

rekening bendahara pengeluaran/ bendahara
pengeluaran pembantu kepihak ketiga.

- | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|
| 8. | Sistem transaksi non tunai akan lebih mempercepat pelaksanaan tutup buku serta pelaporan keuangan dan dijamin keandalannya. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. | Penerapan transaksi non tunai lebih tepat serta lebih cepat pelaksanaan transaksi pembayaran sampai kepengusaha dan ini cocok dengan system akuntansi yaitu <i>accrual based</i> . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

LAMPIRAN II

Reliability Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	33	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	33	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.813	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	35.6970	11.280	.503	.796
X2	35.6364	12.426	.417	.805
X3	35.6970	10.655	.697	.769
X4	35.6970	12.718	.338	.813
X5	35.6667	12.542	.338	.814
X6	35.6364	11.489	.548	.790
X7	35.6970	11.780	.528	.793
X8	35.9091	10.710	.582	.785
X9	35.8182	11.216	.632	.779

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	33	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	33	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.816	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	35.7576	11.627	.548	.793
Y2	35.7879	12.672	.357	.816
Y3	35.5758	12.314	.390	.813
Y4	35.7273	10.955	.651	.779
Y5	35.5455	11.693	.646	.783
Y6	35.6667	12.229	.496	.800
Y7	35.7879	12.860	.314	.821
Y8	35.6364	11.739	.622	.786
Y9	35.7273	11.267	.628	.783

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Transaksi Non Tunai (X) ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Good Government (Y)

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.699 ^a	.489	.472	2.79132	1.881

a. Predictors: (Constant), Transaksi Non Tunai (X)

b. Dependent Variable: Good Government (Y)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	230.708	1	230.708	29.610	.000 ^b
	Residual	241.535	31	7.791		
	Total	472.242	32			

a. Dependent Variable: Good Government (Y)

b. Predictors: (Constant), Transaksi Non Tunai (X)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	11.723	5.247		2.234
	Transaksi Non Tunai (X)	.707	.130	.699	5.442

Coefficients^a

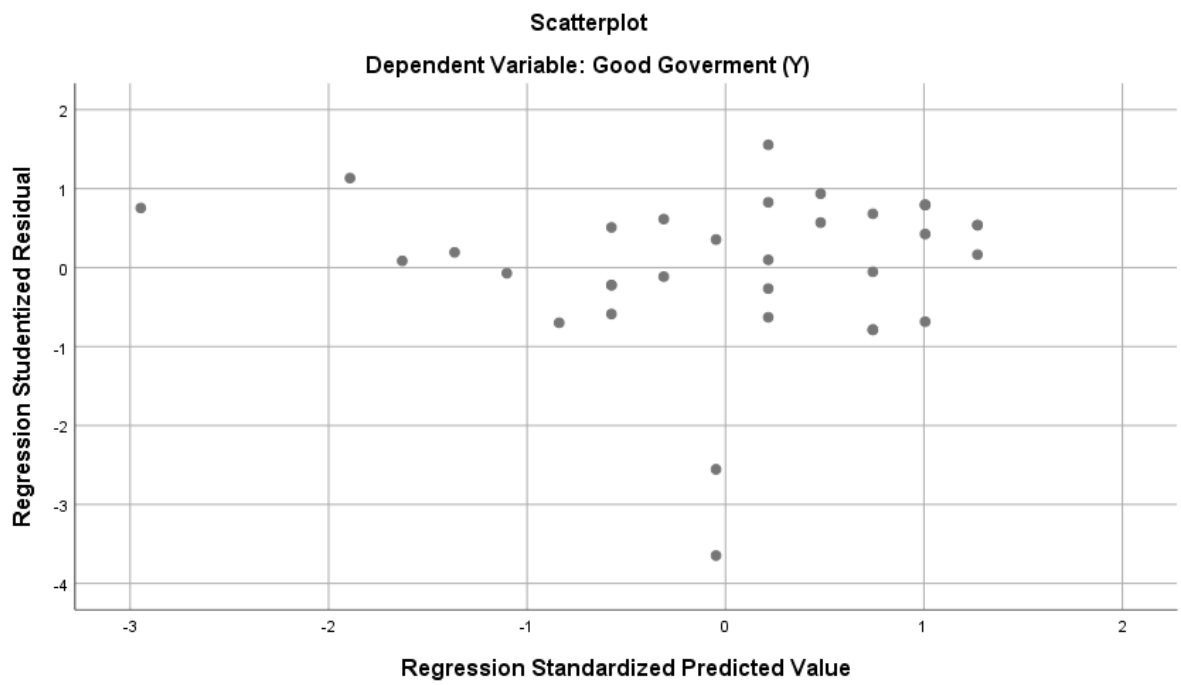
Model

Sig.

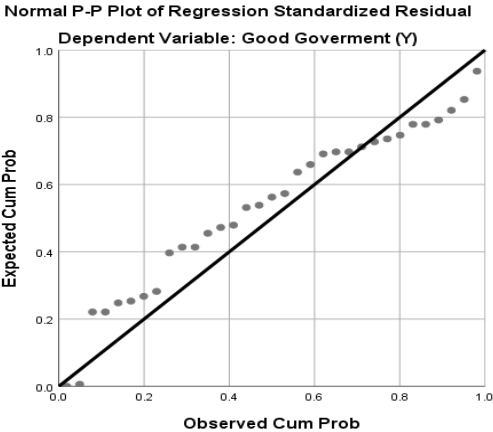
1	(Constant)	.033
	Transaksi Non Tunai (X)	.000

a. Dependent Variable: Good Government (Y)

Charts



Charts



LAMPIRAN III

GLOSARIUM

1. *Agency theory* : konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agen.
2. *Administrative Governance* : Sistem implementasi proses kebijakan.
3. APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) : Alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *Automated Teller Machine* (ATM) dan/atau kartu debit.
4. BPD (Bank Pembangunan Daerah) merujuk pada bank Sulselbar di Sulawesi Barat.
5. BKD : Badan kepegawaian daerah.
6. BPKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
7. BPKAD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
8. CMS (*Cash Management System*) : Fasilitas layanan yang diberikan oleh industri perbankan yang merupakan solusi layanan perbankan berbasis internet untuk nasabah korporasi untuk melakukan monitoring dan transaksi keuangan secara realtime dan online yang akan memudahkan perusahaan ataupun entitas publik dalam bertransaksi.
9. *Chip Card* : Sejenis kartu yang dananya telah tersimpan dalam chip elektronik.
10. *Cryptography*: Ilmu penulisan rahasia yang menggunakan banyak teknik untuk melindungi informasi yang ada dalam format yang tidak dapat dibaca.

11. *Economic Governance*: Proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi.
12. *E-Money* : Uang elektronik.
13. *Electronic Channel* : Layanan perbankan menggunakan media elektronik, baik itu *mobile*, SMS, internet, internet bisnis, dan mobile-ATM.
14. *Good Financial Governance* : Tata kelola keuangan yang baik.
15. *Good Governance* : Cara kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat.
16. IC (*Integrated Circuit*): Komponen Elektronika Aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan bahkan jutaan Transistor, Dioda, Resistor dan Kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu Rangkaian Elektronika dalam sebuah kemasan kecil.
17. *Money Laundry*: Tindak pidana pencucian uang.
18. OPD: Organisasi perangkat daerah.
19. OECD (*Organization Foreconomic Corporation And Develepopment*) : Organisasi ekonomi internasional yang secara teratur menerbitkan laporan yang menganalisis dan membandingkan kebijakan ekonomi negara-negara anggotanya.
20. *Principal* : pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain.
21. *Political Governance*: Proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan.
22. *Rule Of Law* : Landasan hukum.

23. RTGS (*Real Time Gross Settlement*) : Penggunaan waktu nyata untuk transfer antara bank guna mempercepat proses transfer ke rekening penerima.
24. *Stakeholders* : Pemangku kepentingan.
25. *Smart Cards* : Kartu yang mampu menyimpan data secara terintegrasi, dimana data yang terdapat pada *smart card* bersifat elektronik.
26. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah.
27. SPJ : Surat Pertanggungjawaban.
28. Transaksi Non-Tunai : pembayaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
29. TNT : Transaksi Non Tunai
30. UNDP (*United Nations Development Program*) : Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
31. *Value For Money* : Konsep pengukuran kinerja sektor publik yang mengukur kinerja berdasarkan tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
32. WFH (*Working From Home*): Aturan untuk bekerja dari rumah saat masa pandemi.